20 JANUARI 2025

# MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

**JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON**
**NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG**
**TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919**

# INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

## TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

**Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang**
**Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928**

**Website : www.ibi.ac.id** **Email : informasi.inbi@gmail.com**


K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 39/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024

tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| MENETAPKAN | : | MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA |
| KESATU | : | Memberlakukan Manual Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Binamadani Indonesia. |
| KEDUA | : | Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:<br>a. penetapan standar pendidikan tinggi;<br>b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;<br>c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;<br>d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan<br>e. peningkatan standar pendidikan tinggi. |
| KETIGA | : | Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

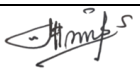
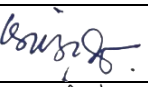
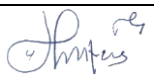
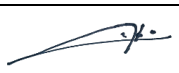
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

## PENANGGUNG JAWAB

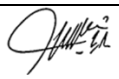
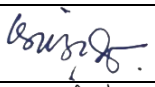
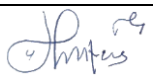
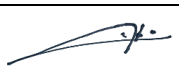
| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Menjamin pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;<br>2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Kegiatan penilaian PkM dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:<br>1. Pengajuan usulan proposal PkM;<br>2. Penjadwalan seminar proposal PkM;<br>3. Pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan jadwal;<br>4. Penjadwalan seminar hasil PkM.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Tugas Rektor;<br>2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja<br>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/format Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;<br>2. Membuat rumusan manual penetapan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor;<br>3. Mengusulkan Kelompok Kerja untuk menyusun standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar.</td><td>Template Standar<br>Template Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>Surat usulan Kelompok Kerja kepada Rektor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kelompok Kerja</td><td>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;<br>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya;<br>3. Merumuskan draf awal standar</td><td>Dokumen perumusan standar<br>Draf Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD;<br>4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. | |
| | 4 | Kepala LPPM | 1. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya;<br>2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar;<br>3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. | Draf Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>Materi sosialisasi |
| | 5 | Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) | 1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja;<br>2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI). | Draf Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| **5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan** | 1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)<br>3. Kepala LPPM<br>4. Dosen | | | |
| **6. Catatan** | Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Daftar Hadir Rapat Penyusunan Standar<br>- Form Notulen Rapat | | | |
| **7. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) | | | |

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

## PENANGGUNG JAWAB

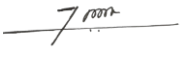
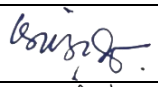
| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian proposal, proses, dan hasil PkM yang memenuhi standar penilaian PkM;<br>2. Agar penilaian PkM berjalan objektif, akuntabel, dan transparan sejalan dengan visi dan misi Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Manual ini meliputi:<br>1. Sosialisasi standar dan instrumen penilaian PkM;<br>2. Penilaian proposal PkM melalui seminar proposal;<br>3. Penilaian laporan hasil PkM melalui seminar hasil;<br>4. Penyampaian hasil penilaian kepada pelaksana PkM.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, dan patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang Tim Reviewer PkM;<br>2. Mengesahkan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</td><td>Surat Tugas Rektor<br>SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Menyusun jadwal seminar proposal dan seminar hasil PkM;<br>2. Menunjuk Reviewer sesuai bidang keilmuan usulan PkM;<br>3. Menyosialisasikan instrumen penilaian kepada dosen dan mahasiswa pelaksana PkM;<br>4. Menetapkan keputusan dan mengumumkan hasil penilaian paling lambat tiga hari kerja setelah menerima hasil penilaian Reviewer.</td><td>Jadwal seminar PkM<br>SK Tim Reviewer PkM<br>Pengumuman hasil penilaian PkM</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reviewer</td><td>1. Menilai proposal dan laporan hasil PkM berdasarkan instrumen penilaian yang ditetapkan LPPM;<br>2. Menyampaikan hasil penilaian beserta masukan perbaikan paling lambat tiga hari kerja setelah seminar.</td><td>Formulir Penilaian Reviewer<br>Berita Acara Seminar PkM</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Mengusulkan dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan PkM;<br>2. Memantau tindak lanjut perbaikan hasil penilaian oleh dosen di program studinya.</td><td>Daftar usulan pelaksana PkM program studi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dosen Pelaksana PkM</td><td>1. Mempresentasikan proposal dan hasil PkM pada seminar;<br>2. Menindaklanjuti masukan Reviewer dan menyerahkan dokumen perbaikan kepada LPPM.</td><td>Proposal PkM<br>Laporan hasil PkM<br>Dokumen perbaikan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyosialisasikan Standar Penilaian PkM dan Manual Penilaian PkM beserta form-formnya;<br>2. Memantau kesesuaian pelaksanaan penilaian PkM dengan standar.</td><td>Dokumen sosialisasi</td></tr>
<tr><td>5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan</td><td colspan="4">1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Kepala LPPM<br>3. Reviewer<br>4. Ketua Program Studi<br>5. Kepala LPM<br>6. Dosen Pelaksana PkM</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **6. Catatan** | Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Formulir Penilaian Reviewer Proposal PkM<br>- Formulir Penilaian Reviewer Laporan Hasil PkM<br>- Berita Acara Seminar PkM |
| **7. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) |

# MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

## PENANGGUNG JAWAB

| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM);<br>2. Untuk memastikan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) dapat dikendalikan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">1. Pemantauan dan pengecekan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) agar berjalan dengan baik;<br>2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM).</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar;<br>2. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di Institut Binamadani Indonesia (INBI);<br>3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kegiatan telah berjalan sesuai dengan isi standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Merekapitulasi hasil penilaian proposal dan laporan hasil PkM pada setiap semester;<br>2. Mengevaluasi ketepatan waktu penilaian, kesesuaian instrumen, dan ketercapaian indikator standar penilaian PkM;<br>3. Menyusun laporan evaluasi penilaian PkM.</td><td>Rekapitulasi hasil penilaian PkM<br>Laporan evaluasi penilaian PkM</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Memantau dosen yang telah dinilai PkM-nya dan menindaklanjuti hasil penilaian;<br>2. Memberikan masukan mengenai pelaksanaan penilaian PkM kepada LPPM.</td><td>Laporan tindak lanjut hasil penilaian</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dosen Pelaksana PkM</td><td>1. Menerima hasil evaluasi penilaian PkM;<br>2. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang diberikan.</td><td>Dokumen perbaikan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian PkM;<br>2. Melaporkan hasil audit mutu internal;<br>3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian PkM.</td><td>Laporan Audit Mutu Internal<br>Dokumen sosialisasi</td></tr>
<tr><td>5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan</td><td colspan="4">1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Wakil Rektor I<br>3. Kepala LPPM<br>4. Ketua Program Studi<br>5. Kepala LPM<br>6. Dosen</td></tr>
<tr><td>6. Catatan</td><td colspan="4">Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Formulir Hasil Evaluasi</td></tr>
</table>

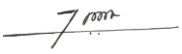
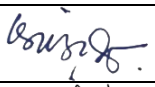
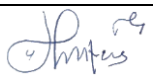
| | |
|---|---|
| **7. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) |

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

# INSTITUT BINAMADANI

# INDONESIA

## PENANGGUNG JAWAB

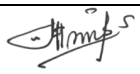
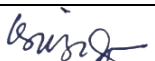
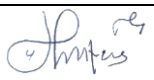
| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM);<br>2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM);<br>2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Perbaikan/koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian;<br>2. Tindakan koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya;<br>3. Pengendalian ketidaksesuaian adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian;<br>4. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan dan target yang harus dicapai.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Rektor mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang, misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar;<br>2. Tindakan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal;<br>3. Menetapkan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, apabila terdapat standar yang belum tercapai sesuai target dan tindakan korektif tersebut diberlakukan di tingkat Institut.</td><td>Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM dan Ketua Program Studi</td><td>1. Bersama-sama dengan LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai;<br>2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;<br>3. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan adanya temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, atau penyimpangan;</td><td>Notulen rapat terkait<br>Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil;<br>5. Memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar;<br>6. Membuat laporan tertulis secara periodik dan melaporkannya kepada Rektor disertai saran dan rekomendasi. | |
| | 3 | Ketua LPM | 1. Bersama-sama dengan Kepala LPPM dan Ketua Program Studi melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya;<br>2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang menjadi tanggung jawabnya pada laporan;<br>3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan Kepala LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup unit. | Laporan Pencapaian Sasaran Mutu<br>Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif |
| **5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan** | 1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Wakil Rektor I<br>3. Kepala LPPM<br>4. Kepala LPM<br>5. Dosen | | | |
| **6. Catatan** | Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Daftar Hadir Rapat<br>- Form Notulen Rapat<br>- Form Perubahan Isi Standar<br>- Form Tindakan Koreksi | | | |
| **7. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) | | | |

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

## PENANGGUNG JAWAB

| PROSES | NAMA | JABATAN | TTD | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kaprodi Sarjana PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | M. Ansori, M.Ag. | Kaprodi Sarjana PGMI |  | 20 Jan 2025 |
| | Mariya Ulpah, M.H. | Kaprodi Sarjana PBS |  | 20 Jan 2025 |
| | Infi Ulfi Sholichah, M.H. | Kaprodi Sarjana HES |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Umar Samsudin, M.S.I | Kaprodi Magister PAI |  | 20 Jan 2025 |
| | Ashabul Kahfi, M.Pd.I. | Sekretaris LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| Pemeriksaan | Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd | Wakil Rektor I (Bidang Akademik) |  | 20 Jan 2025 |
| | Nahdiah, S.Kep., S.Pd. | Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM) |  | 20 Jan 2025 |
| | Awaluddin, M.Pd | Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama) |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Achmad Saeful, MA. | Kepala LPPM |  | 20 Jan 2025 |
| | Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I | Ketua Senat |  | 20 Jan 2025 |
| Persetujuan | H. Patwan Siahaan, M.H. | Ketua Yayasan |  | 20 Jan 2025 |
| Penetapan | Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag. | Rektor |  | 20 Jan 2025 |
| Pengendalian | Dr. Dede Ibrahim, M.Pd. | Kepala LPM |  | 20 Jan 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Tujuan Manual** | Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM). | | | |
| **2. Luas Lingkup** | Manual ini meliputi siklus pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) baik secara semesteran maupun tahun akademik atau juga secara periodik berdasarkan masa berlakunya Rencana Operasional dan Rencana Strategis. | | | |
| **3. Daftar Istilah** | 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan;<br>2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM): tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada hasil pelaksanaan standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI), serta relevansinya dengan Visi dan Misi INBI. | | | |
| **4. Langkah-langkah Prosedur** | **No** | **Subyek/ Pelaku** | **Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan** | **Dokumen** |
| | 1 | Rektor | 1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk peningkatan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat melalui Surat Tugas Rektor;<br>2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. | Surat Tugas Kelompok Kerja<br>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru |
| | 2 | Kepala LPM | 1. Menyediakan template buku standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;<br>2. Membentuk tim Kelompok Kerja untuk melakukan peningkatan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;<br>3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. | Template Buku Standar<br>Dokumen pengendalian standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| | 3 | Kelompok Kerja | 1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya;<br>2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;<br>3. Bersama-sama dengan Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut;<br>4. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya (Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat) terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;<br>5. Merumuskan draf standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Dokumen survei<br>Dokumen analisis SWOT<br>Dokumen uji publik |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD;<br>6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. | |
| | 4 | Wakil Rektor I | 1. Bersama dengan Kelompok Kerja menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;<br>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. | Draf Buku Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah ditingkatkan |
| **5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan** | 1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>2. Wakil Rektor I<br>3. Kepala LPM<br>4. Dosen | | | |
| **6. Catatan** | Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>- Daftar Hadir Rapat<br>- Form Survei<br>- Form Perbaikan Berlanjut<br>- Form Tindakan Koreksi | | | |
| **7. Referensi** | 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;<br>4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;<br>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;<br>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.<br>9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)<br>10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI) | | | |